



BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kotabaru tahun 2022 nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penjabaran dari RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Peyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dengan Sistematis sebagai berikut:
- a. PENDAHULUAN;
 - b. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN
 - e. PENUTUP.
- (2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 7 AGUSTUS 2023
BUPATI KOTABARU,



Diundangkan di Kotabaru
Pada tanggal 7 AGUSTUS 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	Inspektorat
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Badan Pendapatan Daerah
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Sekretariat Daerah
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24	Dinas Perikanan

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
28	Dinas Sosial
29	Rumah Sakit Umum
30	Kecamatan Hampang
31	Kecamatan Pamukan Utara
32	Kecamatan Pamukan Barat
33	Kecamatan Pamukan Selatan
34	Kecamatan Sungai Durian
35	Kecamatan Sampanahan
36	Kecamatan Sembilan
37	Kecamatan Kelumpang Utara
38	Kecamatan Kelumpang Selatan
39	Kecamatan Kelumpang Hulu
40	Kecamatan Kelumpang Tengah
41	Kecamatan Kelumpang Barat
42	Kecamatan Kelumpang Hilir
43	Kecamatan Pulau Sebuk
44	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
45	Kecamatan Pulau Laut Selatan
46	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
47	Kecamatan Pulau Laut Barat
48	Kecamatan Pulau Laut Tengah
49	Kecamatan Pulau Laut Utara
50	Kecamatan Pulau laut Sigam
51	Kecamatan Pulau Laut Timur



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini sebagai rancangan teknokratik atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan pada Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai dengan visi dan misi Bupati Kotabaru terpilih periode tahun 2021-2026 yang akan dituangkan dalam RPJMD.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kotabaru, 28 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. MUHAMAD YUSUF, S.Pd
NIP. 19661109 198503 1 001
PEMBINA TK. I (IV/B)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	54
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	57
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rumusan Program dan Kegiatan	76
BAB V PENUTUP	86



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022
Tabel 2.2.1	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2.2	:	Cakupan data di masing masing bidang pada BKPSDM Kabupaten Kotabaru
Tabel 2.4	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Tabel 2.5	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Tabel 3.1	:	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Kotabaru
Tabel 3.2	:	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
Tabel 4.1	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 : Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru tahun 2024.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026.

Renja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 memberi gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

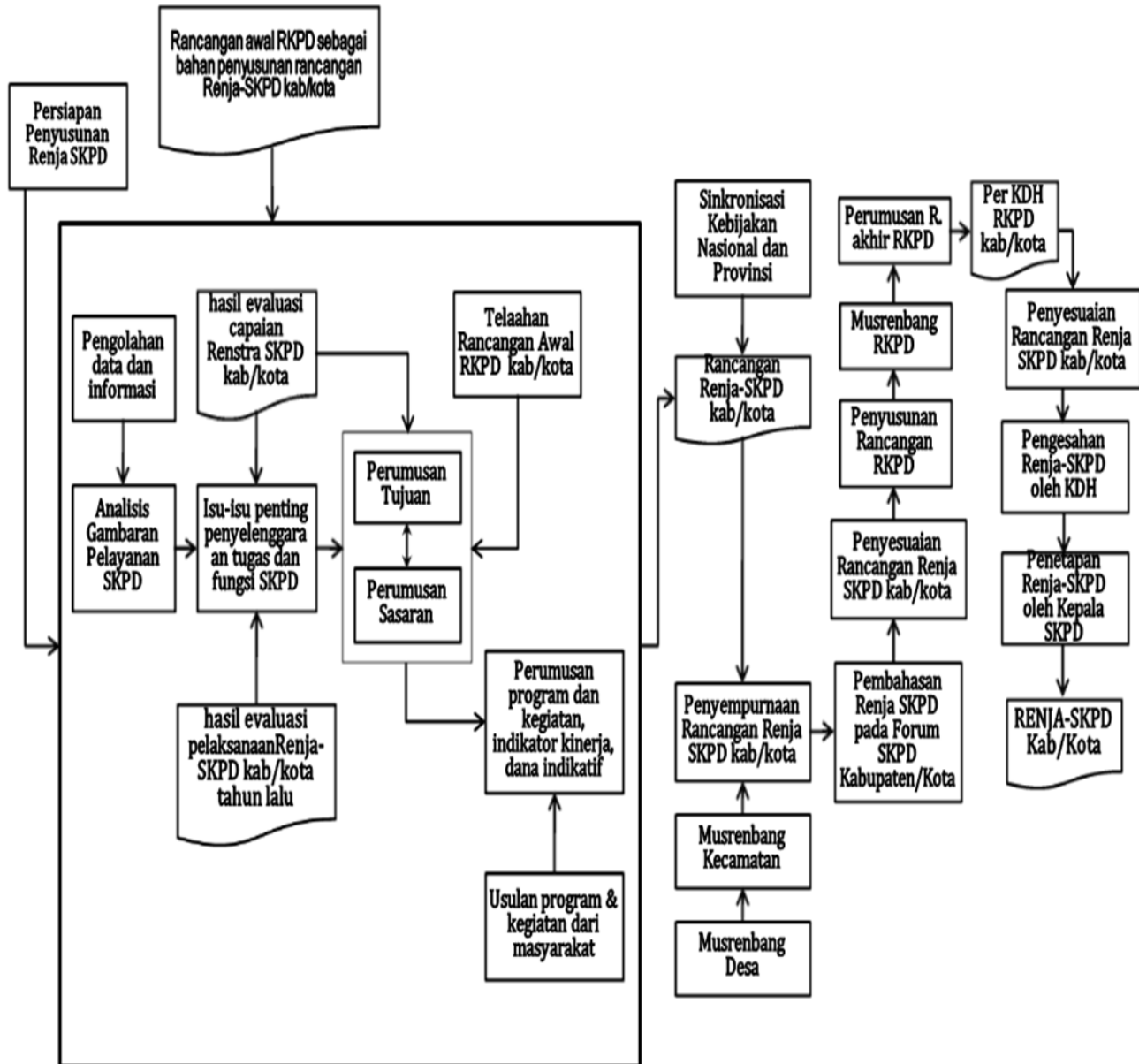
Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai Sub Sistem dari penyelenggaraan Pemerintah dituntut mampu menjabarkan visi tersebut yang mana setiap tahun diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang akan datang.

Bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Gambar 1.1

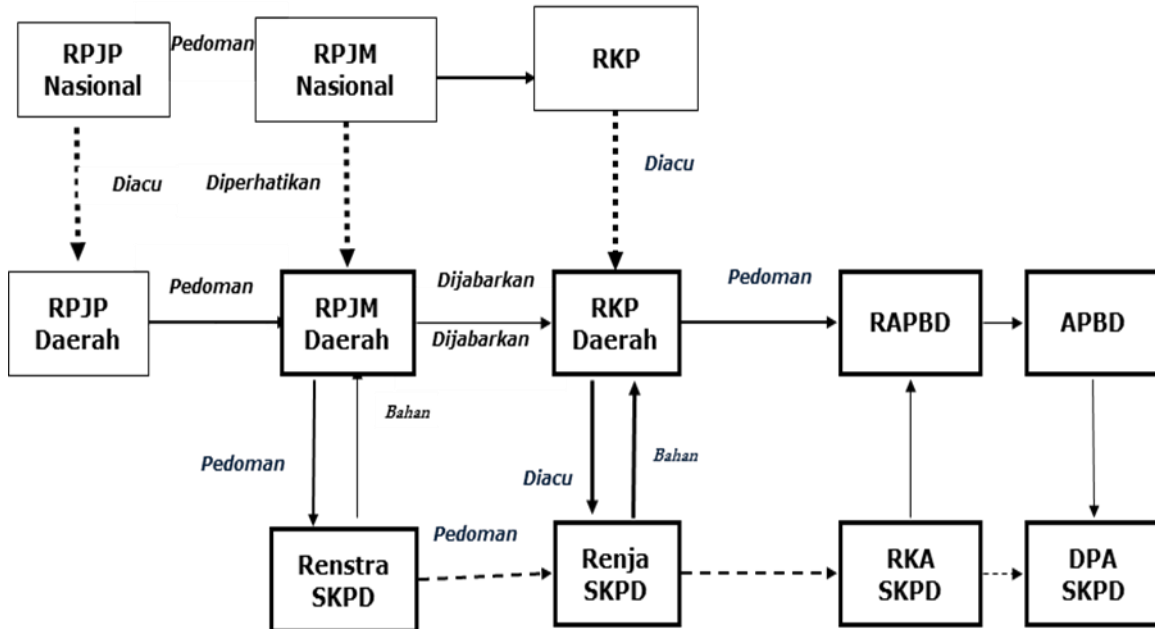
Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Gambar 1.2

keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD



1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 merupakan rencana kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16).

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kotabaru tahun 2022 Nomor 20);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 9);
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186).
6. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 52).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Tahun ke-3.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya serta mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2022 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mengelola 3 Program, 13 Kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Kepegawaian Daerah

2.1 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Pengelolaan Data Kepegawaian

2.2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Promosi ASN
- b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

2.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

2.4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin
- d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
- e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

3.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional
- b. Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dari data realisasi 3 program, 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ada 5 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dikarenakan belanja tagihan telepon dan listrik dibayar sesuai dengan pemakaian. Dan apabila air PDAM tidak mengalir maka dilakukan pembelian air swadaya
- 2) Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin pada Kegiatan Rapat MPPHD dan Rapat Kode Etik belum terealisasi dikarenakan kasus pelanggaran kode etik tidak ada.
- 3) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dikarenakan SPJ belum lengkap dari Mahasiswa Tugas Belajar
- 4) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan CPNS dan PPPK belum terealisasi dikarenakan Penyerapan Anggaran kegiatan Pengadaan PPPK berdasarkan pada jadwal yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat
- 5) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dikarenakan



- a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 29 Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Mebel
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Kantor
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lainnya



23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 26. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 27. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 28. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 29. Pengelolaan Promosi ASN
 30. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 31. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 32. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum
- b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Terdapat 16 Sub Kegiatan belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 2. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
 3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 4. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 5. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 6. Pengelolaan Data Kepegawaian
 7. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 8. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

9. Pembinaan Disiplin ASN
 10. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 11. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra;
- Terdapat program kegiatan yang melebihi target dari capaian program renstra yang perlu disesuaikan dalam capaian renstra.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 1) Dilakukannya evaluasi secara berkala terkait serapan target fisik dan target keuangan setiap kegiatan
 - 2) Dilakukannya koordinasi dan konsolidasi dengan pihak penyelenggara diklat dan pengembangan kompetensi lainnya secara intensif agar diperoleh penjadwalan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur daerah.
 - 3) Sebagai lembaga teknis pengelola kepegawaian agar meningkatkan konsultasi dengan pejabat pembina kepegawaian daerah untuk percepatan penyelesaian dokumen kepegawaian sesuai SOP yang telah ditentukan.
 - 4) Mengoptimalkan penggunaan media Teknologi Informasi untuk koordinasi dan pengembangan kompetensi pegawai sehubungan kondisi Pandemi yang terjadi di Indonesia.



Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 KABUPATEN KOTABARU

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)			
										Target Renja		Realisasi Renja				Tingkat Realisasi %	Realisasi capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	1				2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	X	XX	01		NON URUSAN														
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	X	XX	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1	X	XX	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	11	dokumen	5	11	dokumen	11	dokumen	100,00	10	dokumen	26	dokumen	
2	X	XX	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	
3	X	XX	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	
4	X	XX	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	
5	X	XX	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	
6	X	XX	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	8	dokumen	4	8	dokumen	8	dokumen	100,00	32	Laporan	44	Laporan	
7	X	XX	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	20	dokumen	6	20	dokumen	20	dokumen	100,00	7	Laporan	33	Laporan	
	X	XX	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												-		
8	X	XX	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26	Kali pembayaran	26	26	Kali pembayaran	26	Kali pembayaran	100,00	55	Orang	107	Orang	
9	X	XX	01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	12	Kali pembayaran	12	12	Kali pembayaran	12	Kali pembayaran	100,00	12	dokumen	36	dokumen	
10	X	XX	01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	24	dokumen	24	24	Kali pembayaran	24	Kali pembayaran	100,00	12	dokumen	60	dokumen	
11	X	XX	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	dokumen	1	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	Laporan	5	Laporan	
12	X	XX	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									16	Laporan	16	Laporan	
13	X	XX	01	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1	dokumen	1	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)		
										Target Renja		Realisasi Renja				Tingkat Realisasi %	Realisasi capaian Program dan Kegiatan	
	X	XX	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										-			
14	X	XX	01	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			Paket			100	Paket	100	Paket	
15	X	XX	01	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Orang			Orang			7	Orang	7	Orang	
16	X	XX	01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan	3	Kali	3	3	Kali	3	Kali	100,00	300	Kali	306	
	X	XX	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah										-			
17	X	XX	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	kali penyediaan	6	6	kali penyediaan	5,90	kali penyediaan	98,33	6	paket	18	
18	X	XX	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	kali penyediaan	12	24	kali penyediaan	24	kali penyediaan	100,00	12	paket	48	
19	X	XX	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13816	kali penyediaan	13816	17757	Kali	16871	Kali	95,01	1076	paket	31.763	
20	X	XX	01	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	kali penyediaan	6	6	kali penyediaan	6	kali penyediaan	100,00	6	paket	18	
21	X	XX	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	kali penyediaan	12	12	kali penyediaan	12	kali penyediaan	100,00	12	dokumen	36	
22	X	XX	01	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	12	bulan	12	12	bulan	12	bulan	100,00	12	laporan	36	
23	X	XX	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	110	kali	105	651	kali	646	kali	99,23	510	laporan	1.261	
24	X	XX	01	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								9	dokumen	9	dokumen	
	X	XX	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										-			
25	X	XX	01	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		jenit/unit		69	jenit/unit	69	jenit/unit	100,00	21	unit	90	
26	X	XX	01	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	30	jenit/unit	24	30	jenit/unit	30	jenit/unit	100,00	42	unit	96	
27	X	XX	01	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9	jenis/unit	10	9	jenis/unit	9	jenis/unit	100,00	5	unit	24	
	X	XX	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										-			
28	X	XX	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	4527	kali penyediaan	2001	3256	surat	3200	surat	98,28	12	laporan	5.213	
29	X	XX	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	73	kali penyediaan	53	73	kali pembayaran	64	kali pembayaran	87,67	89	laporan	206	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)			
										Target Renja		Realisasi Renja				Tingkat Realisasi %	Realisasi capaian Program dan Kegiatan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
30	X	XX	01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	124	kali penyediaan	112	124	kali pembayaran	99	kali pembayaran	79,84	367	laporan	578	laporan	
		X	XX	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												-		
31	X	XX	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	24	kali	72	24	kali	24	kali	100,00	28	unit	124	unit	
32	X	XX	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	kali	1	1	kali	1	kali	100,00	2	unit	4	unit	
33	X	XX	01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	42	kali	41	41	kali	41	kali	100,00	39	unit	121	unit	
34	X	XX	01	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	26	kali	26	26	kali	26	kali	100,00	27	unit	79	unit	
		5	03		KEPEGAWAIAN												-		
		5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												-		
		5	03	02	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												-		
35	5	03	02	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	dokumen	1	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	
36	5	03	02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	1	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	
37	5	03	02	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	dokumen	1	1	kali	1	kali	100,00	1	dokumen	3	dokumen	
38	5	03	02	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	berkas	130	177	berkas	177	berkas	100,00	100	dokumen	407	dokumen	
39	5	03	02	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6	kali	6	6	kali	6	kali	100,00	5	lembaga	17	lembaga	
40	5	03	02	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	dokumen	1	1	dokumen	1	dokumen	100,00	14	dokumen	16	dokumen	
41	5	03	02	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian	6	kali	4	6	kali	6	kali	100,00	2	dokumen	12	dokumen	
		5	03	02	Mutasi dan Promosi ASN												-		
42	5	03	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pengelolaan Mutasi ASN									50	dokumen	50	dokumen	
43	5	03	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3	kali pelaksanaan	3	3	kali	3	kali	100,00	2	dokumen	8	dokumen	
44	5	03	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	10	kali pelaksanaan	4	12	kali	12	kali	100,00	200	dokumen	216	dokumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)		
										Target Renja		Realisasi Renja				Tingkat Realisasi %	Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
	5	03	02		Pengembangan Kompetensi ASN											-		
45	5	03	02	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20	orang	15	14	orang	14	orang	100,00	20	orang	49	orang
46	5	03	02	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1000	SK	394	1358	SK	1358	SK	100,00	1000	orang	2.752	orang
	5	03	02		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											-		
47	5	03	02	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9	kali	8	9	kali	9	kali	100,00	9	dokumen	26	dokumen
48	5	03	02	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1	kali pelaksanaan	1	1	kali pelaksanaan	1	kali pelaksanaan	100,00	200	orang	202	orang
49	5	03	02	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN	40	kali	3	35	kali	11	kali	31,43	1100	orang	1.114	orang
50	5	03	02	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	kasus	17	10	kasus	10	kasus	100,00	10	laporan	37	laporan
51	5	03	02	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10	kasus	14	10	kasus	10	kasus	100,00	-	laporan	24	laporan
	5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											-		
	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											-		
	5	04	02		Pengembangan Kompetensi Teknis											-		
52	5	04	02	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	55	Orang	5	55	Orang	55	Orang	100,00		Orang	60	Orang
	5	04	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											-		
53	5	04	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	1	dokumen	1	3	dokumen	3	dokumen	100,00	1	dokumen	5	dokumen
54	5	04	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	50	Orang	173	750	Orang	750	Orang	100,00	7	Orang	930	Orang

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Perangkat Daerah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.1.



TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							REALISASI CAPAIAN					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu taspen			5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	perubahan prosedur layanan taspen langsung berurusan ke taspen
2	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu Pegawai			66	66	66	66	30	30	30	84	43	24	32	3	
3	Jumlah layanan pengajuan usul piagam penghargaan SLKS 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun			287	287	287	287	300	300	300	208	300	269	321	-	
4	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu suami (karsu) dan kartu isteri (karis)			123	123	123	123	90	90	90	126	152	138	98	14	
5	Melaksanakan Diklat Manajemen Usaha bagi PNS yang purna tugas (Diklat Purna Tugas)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Jumlah Layanan pengajuan izin cuti															
	a. Izin cuti tahunan			63	63	63	63	600	600	600	297	441	500	705	264	
	b. Izin cuti besar			1	1	1	1	30	30	30	66	66	13	42	7	
	c. Izin cuti sakit			4	5	4	4	100	100	100	43	25	42	140	73	
	d. Izin cuti bersalin			30	30	30	30	50	50	50	9	50	43	69	17	
	e. Izin cuti karena alasan penting			62	62	62	62	80	80	80	41	41	65	113	39	
	f. Izin cuti diluar tanggungan negara			-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	
7	Jumlah Layanan Pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perkawinan			3	3	3	3	-	-	-	16	-	-	-	-	Perubahan prosedur layanan langsung ke SKPD Masing- masing
8	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perceraian			4	4	4	4	10	10	10	19	14	18	12	3	
9	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa			3	3	3	3	-	-	-	3	1	-	-	-	
10	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa			1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							REALISASI CAPAIAN					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
11	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pensiun PNS															
	a. Pensiun BUP			36	36	36	36	143	152	158	109	159	157	124	25	tidak terprediksi
	b. Pensiun atas permintaan sendiri			12	12	12	12	-	-	-	15	9	10	16	1	tidak terprediksi
	c. Pensiun Janda/ Duda/ Yatim			5	5	5	5	-	-	-	31	30	45	23	7	tidak terprediksi
	d. Pensiun dipercepat sakit/ keuzuran			1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	2	1	tidak terprediksi
	e. Pensiun Anumerta/ tewas dalam tugas			1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	tidak terprediksi
12	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pengajuan cetak ke-2 dan perbaikan konversi NIP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu pegawai elektronik (KPE)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Jumlah Layanan kenaikan pangkat PNS			803	803	803	803	803	-	-	848	478	910	593	507	
15	Jumlah Layanan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala			1760	1760	1760	1760	1760	-	-	1824	2128	2435	1705	1094	
16	Jumlah layanan usul pencantuman gelar PNS			30	30	30	30	30	-	-	29	27	24	37	-	
17	Jumlah Layanan usul ujian dinas tingkat I dan tingkat II			20	20	20	20	20	-	-	-	37	80	-	-	
18	Jumlah Layanan usul peninjauan masa kerja (PMK)			20	20	20	20	20	-	-	8	9	27	22	-	
19	Jumlah layanan pemindahan/mutasi PNS atas permohonan															
	a. Pindah Tugas PNS Mutasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			15	15	15	1200	220	220	220	133	63	117	1324		tidak terprediksi
	b. Pindah Tugas PNS mutasi keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			8	8	8	10	10	10	10	26	8	5	13		tidak terprediksi
	c. Pindah tugas PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah kabupaten Kotabaru			1	1	1	10	10	10	10	4	4	3	8		tidak terprediksi
20	Jumlah Layanan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu															
	a. Pengangkatan JF melalui perpindahan JF yang serumpun maupun beda rumpun			1	1	1	1	1	1	1	-	-	3	-	-	
	b. Pengangkatan kembali karena dalam waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan			1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	c. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							REALISASI CAPAIAN					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	d. Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			1	1	1	1	3	3	3	-	-	-	-	-	
	e. Tunjangan Jabatan Fungsional karena perubahan Peraturan Presiden			35	35	35	35	35	35	35	24	4	18	21	-	
	f. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF/mutasi keluar daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	g. Pembebasan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan			5	5	2	5	7	7	7	1	2	-	1	-	
	h. Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 5 (lima) tahun			1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	i. Pemberhentian dari JF karena alasan kesehatan				-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	
	j. Pemberhentian dari JF karena dalam waktu 6 (enam) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit			4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	
	k. Pengangkatan dalam JF jenjang utama			1	1	1	1	4	4	4	-	-	-	-	-	
	l. Pengangkatan dalam JF melalui inpassing			1	1	1	1	3	3	3	2	-	6	-	-	
	m. Pengangkatan JF melalui perpindahan dari JFU menjadi JFT			1	1	1	1	5	5	5	-	-	-	5	-	
	n. Pengangkatan kembali karena selesai mengikuti tugas belajar			5	5	5	5	7	7	7	6	5	3	6	-	
	o. Pengangkatan pertama kali dalam JF melalui formasi CPNS			15	15	15	15	160	160	160	100	6	189	159	-	
	p. Penyesuaian JF tingkat Terampil menjadi JF tingkat ahli			20	20	20	20	7	7	7	5	6	2	4	-	
	q. Penyesuaian kenaikan Jabatan Fungsional			100	100	100	100	120	120	120	187	101	171	117	-	
21	Jumlah layanan penempatan PNS setelah tugas belajar			1	1	1	10	10	10	10	11	6	-	10	-	tidak terprediksi
22	Jumlah layanan Penunjukan PNS tugas belajar			10	10	10	10	10	10	10	18	6	62	1	-	
23	Jumlah layanan usul perbaikan SK			10	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	
24	Jumlah layanan PNS izin belajar			30	30	30	30	30	30	30	20	5	7	22	-	
25	Jumlah layanan usul pengangkatan CPNS menjadi PNS			80	80	80	80	80	80	80	-	232	-	-	-	
26	Jumlah layanan penawaran diklat ke SKPD dan penerbitan surat perintah mengikuti diklat			5	7	7	7	5	5	5	2	2	2	40	-	
27	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Prajabatan Golongan I,II,III			75	75	75	75	100	100	100	44	188	133	3	-	
28	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Kepemimpinan tingkat II,III,IV			16	16	16	16	7	7	7	13	11	24	4	-	



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cakupan data masing-masing bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.2



TABEL DATA 2.2.2.1
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN		TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN						
	-	TEGURAN LISAN	-	-	-	-	-
	-	TEGURAN TERTULIS	-	10	3	-	-
	-	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	-	-	-	-	-
2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG						
	-	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
	-	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
	-	PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
3	HUKUMAN DISIPLIN BERAT						
	-	PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 3 TAHUN	-	1	-	-	-
	-	PEMBEBASAN JABATAN	-	-	-	-	-
	-	PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENUNDAAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH	-	-	-	-	-
	-	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT UNTUK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS	-	-	-	-	-
	-	PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PNS	11	-	-	-	-
	JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PP 94 TAHUN 2021						
	-	PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 BULAN	-	-	-	-	-
	-	PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 BULAN	-	-	-	-	-
	-	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS	-	-	-	-	-
	JENIS HUKUMAN BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2017						
	-	PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA	-	-	2	-	-
	-	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	-	-	1	-	-
	-	PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN	-	-	-	2	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL DATA 2.2.2.1.1
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	KARTU PEGAWAI	84	43	24	138	35
2	KARTU SUAMI	61	78	59	78	11
3	KARTU ISTERI	84	74	79	65	20
4	KARTU TASPEN	-		-	-	-
5	CUTI :					
	- CUTI TAHUNAN	297	441	500	870	670
	- CUTI BESAR	66	66	13	42	53
	- CUTI SAKIT	43	25	42	162	108
	- CUTI BERSALIN	9	50	43	70	28
	- CUTI ALASAN PENTING	41	41	65	120	61
	- CUTI PERNIKAHAN	-	-	-	-	-
6	SK SUMPAH DAN JANJI PNS	-	-	-	140	-

TABEL DATA 2.2.2.1.2
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SATYA LANCANA KARYA SATYA					
	- 10 TAHUN	208	211	197	10	164
	- 20 TAHUN	86	40	32	4	37
	- 30 TAHUN	67	49	40	6	37
2	SK IJIN PERNIKAHAN	26	9	-	-	-
3	SK IJIN PERCERAIAN	19	14	18	12	6



TABEL 2.2.2.1.3
DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI
DATA PNSD KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019 - 2023

NO	TINGKAT	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	D-1	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3
2	D-2	213	142	202	133	164	102	138	85	131	79
3	D-3/sarmud	158	396	144	389	131	394	127	386	126	385
4	D-4	38	44	37	45	39	56	37	56	35	56
5	S-1	1009	1065	980	1058	1058	1168	1016	1155	993	1142
6	S-2	196	79	188	77	184	84	181	94	175	93
7	S-3	4	-	4	-	2	-	2	1	2	1
8	Sarmud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SD	49	3	46	2	36	1	33	1	31	1
10	SLTA	669	333	630	319	510	249	463	230	452	223
11	SLTP	67	10	64	9	53	5	46	3	44	2
JUMLAH		2409	2077	2300	2037	2181	2063	2047	2014	1992	1985
		4486		4337		4244		4061		3977	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.2.2.2
CAKUPAN DATA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

NO	JENIS DIKLAT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	DIKLAT PIM					
	- TINGKAT II	-	-	27	-	-
	- TINGKAT III	4	-	10	10	3
	- TINGKAT IV	9	11	10	5	6
2	DIKLAT PRAJABATAN					
	- GOLONGAN I DAN II	31	6	21	3	2
	- GOLONGAN III	13	182	112	-	1
3	DIKLAT TEKNIS YANG DIKUTI (BKPSDM Penyelenggara)	121	116	-	-	114
4	DIKLAT TEKNIS (Instansi Luar Penyelenggara)	52	15	16	28	2
5	DIKLAT FUNGSIONAL (Instansi Luar Penyelenggara)	21	1	9	8	23

TABEL 2.2.2.2.1
CAKUPAN DATA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

NO	JENIS DIKLAT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SK TUGAS BELAJAR					
	- D3	-		-	-	-
	- S1 / D IV	10	4	2	-	4
	- S2	7	2	5	1	11
	- S3	-		-	-	-
2	IZIN BELAJAR					
	- PAKET C	-	34	2	-	-
	- D3	-	7	-	-	-
	- S1	15	229	42	19	4
	- S2	5	37	18	7	4
	- S3	-	1	-	-	-
3	JUMLAH PELAMAR ASN	2.541	-	-	-	1224
4	JUMLAH ASN LULUS ADMINISTRASI	2.120	-	-	-	1107
5	JUMLAH ASN LULUS SELEKSI	-	275	-	-	64
6	JUMLAH ASN YANG DITEMPATKAN	-	132	-	3	59



TABEL 2.2.2.3
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
DATA PNSD KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK KENAIKAN PANGKAT
TAHUN 2019 - 2023

NO	TINGKAT	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER
1	GOLONGAN I	14	9	4	2	11	3	4	7	4	
2	GOLONGAN II	177	78	72	28	175	43	71	50	63	
3	GOLONGAN III	331	161	196	130	439	165	271	141	409	
4	GOLONGAN IV	57	21	41	20	42	32	20	27	31	
JUMLAH		579	269	313	180	667	243	366	225	507	
		848		493		910		591		507	

TABEL 2.2.2.3.1
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
DATA PNS KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK GAJI BERKALA
TAHUN 2019 - 2023

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	GOLONGAN I	28	39	24	23	2
2	GOLONGAN II	379	518	522	312	126
3	GOLONGAN III	964	1200	1460	1057	760
4	GOLONGAN IV	453	371	429	313	206
JUMLAH		1824	2128	2435	1705	1094



TABEL 2.2.2.3.2
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
DATA PNS KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN BATAS USIA PENSIUN
TAHUN 2022 - 2026

NO	GOLONGAN	TAHUN									
		2022		2023		2024		2025		2026	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	GOLONGAN I	3	-	2	-	3	-	3	-	1	-
2	GOLONGAN II	11	1	9	2	15	7	12	3	20	1
3	GOLONGAN III	40	8	32	20	24	20	29	25	36	24
4	GOLONGAN IV	61	27	49	25	64	21	32	44	52	24
JUMLAH		115	36	92	47	106	48	76	72	109	49
		151		139		154		148		158	

TABEL 2.2.2.3.3
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
DATA PNS KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK PENSIUN
TAHUN 2019 - 2023

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENSIUN BUP	115	159	157	130	25
2	PENSIUN JANDA	22	25	37	18	5
3	PENSIUN DUDA	8	5	8	9	2
4	PENSIUN DINI	9	9	10	18	1
5	PENSIUN KEUJURAN	1	-	0	2	1
6	PENSIUN ANUMERTA	-	-	1	-	-
JUMLAH		155	198	213	177	34

TABEL 2.2.2.3.4
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
TAHUN 2019 - 2023

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	DATA MUTASI:					
	Ke Luar Pemkab Kotabaru					
1	- KE KEMENTERIAN	-	-	-	-	-
2	- KE PROVINSI	5	4	3	8	
3	- KAB/ KOTA	19	8	5	5	2
4	- LUAR PROVINSI	2	8	5	7	
	Ke Llingkungan Pemkab Kotabaru					
5	- Provinsi/ Kab Kota	2	4	1	11	
6	- PEGAWAI PUSAT MENJADI PNSD	2	-	1	2	2
7	Mutasi Internal	133	63	117	128	11
JUMLAH		163	87	132	161	15



TABEL 2.2.2.3.5
DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
DATA PNS KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN PETA JABATAN
TAHUN 2021 - 2023

NO	ESELON	TAHUN			TAHUN			TAHUN		
		2021			2022			2023		
		FORMASI	TERISI	KOSONG	FORMASI	TERISI	KOSONG	FORMASI	TERISI	KOSONG
1	II / A	1	1	0	1	1	-	1	1	-
2	II / B	34	27	7	34	29	5	33	28	5
3	III / A	65	44	21	65	46	19	65	45	20
4	III / B	122	97	25	122	100	22	117	100	17
5	IV / A	506	345	161	256	180	76	246	176	70
6	IV / B	69	37	32	70	35	35	70	34	36
		797	551	246	548	391	157	532	384	148



TABEL 2.2.2.4
DATA UMUM BKPSDM KABUPATEN KOTABARU

1. Data Kepegawaian

a. Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2	Jumlah
1	IV	0	0	0	0	0	0	2	1	3
2	III	0	0	0	0	0	0	20	4	24
3	II	0	0	3	0	0	3	4	0	10
4	I	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	NON PNS	0	0	4	0	0	1	4	0	9
Jumlah		1	0	7	0	0	4	30	5	47

b. Berdasarkan Jabatan dan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	II/b	1	
2	Sekretaris	III/a	1	
3	Kepala Bidang	III/b	3	
4	Kepala Sub Bidang / Bagian	IV/a	3	
5	Jabatan Fungsional		6	
6	Jabatan Fungsional Tertentu		5	
7	Pelaksana		19	

c. Diklat - diklat / Bimtek yang telah diikuti oleh SDM di BKPSDM Kab. Kotabaru

No	Diklat Yang Diikuti	Jumlah	Lama Diklat/ Bimtek	Keterangan
1	Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Angkatan I	1 Orang	13 Hari	Tahun 2018
2	Pelatihan Penyusunan Renja dan Renstra	2 Orang	3 Hari	Tahun 2019
3	Pelatihan Manajemen Kearsipan berbasis IT	1 Orang	3 Hari	Tahun 2019
4	Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian	1 Orang	13 Hari	Tahun 2020
5	Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur	1 Orang	30 Hari	Tahun 2021



TABEL 2.2.2.5
DATA TENAGA NON PNS (TNP) KABUPATEN KOTABARU

No	SKPD & KECAMATAN	TAHUN				KET
		2020	2021	2022	2023	
1	Sekretariat Daerah	85	90	64	64	
2	Inspektorat	6	5	4	4	
3	Sekretariat DPRD	30	28	18	18	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29	28	27	27	
5	Dinas Kesehatan	69	67	40	37	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113	108	37	38	
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11	9	8	8	
8	Dinas PP, PA, PP dan KB	35	33	30	31	
9	Dinas Lingkungan Hidup	101	106	15	16	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63	61	41	39	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	12	13	13	
12	Dinas Perhubungan	34	31	29	28	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	17	17	17	
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	76	74	23	23	
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15	14	12	11	
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	35	34	33	33	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	26	25	23	23	
18	Dinas Perikanan	34	32	27	27	
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36	33	29	31	
20	Satpol PP dan Damkar	54	52	54	54	
21	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan	12	11	9	9	
22	Dinas Ketahanan Pangan	14	14	11	0	Th 2023 SKPD di gabung ke Dinas Pertanian
23	Dinas Sosial	7	6	5	5	
24	Bappeda	21	16	15	17	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	SKPD & KECAMATAN	TAHUN				KET
		2020	2021	2022	2023	
25	BPKAD	26	26	23	25	
26	Badan Pendapatan Daerah	12	11	11	10	
27	BKPSDM	15	15	9	10	
28	Badan Kesbangpol	7	7	7	10	
29	BPBD	10	10	7	7	
30	RSU Pangeran Jaya Sumitra	104	100	80	80	
31	Kec. Kelumpang Utara	3	3	5	5	
32	Kec. Kelumpang Barat	2	2	3	3	
33	Kec. Kelumpang Tengah	2	2	1	1	
34	Kec. Kelumpang Hulu	3	3	2	2	
35	Kec. Kelumpang Hilir	3	4	3	3	
36	Kec. Kelumpang Selatan	1	1	1	1	
37	Kec. Sampanahan	1	1	2	1	
38	Kec. Sungai Durian	2	2	2	2	
39	Kec. Hampang	3	3	4	4	
40	Kec. Pamukan Selatan	3	3	4	3	
41	Kec. Pamukan Utara	1	0	0	0	Tidak ada TNP
42	Kec. Pamukan Barat	1	2	3	3	
43	Kec. Pulau Sebuk	3	3	2	2	
44	Kec. Pulau sembilan	4	4	4	4	
45	Kec. Pulauaut Utara	8	9	8	8	
46	Kec. Pulauaut Timur	2	2	2	2	
47	Kec. Pulauaut Barat	1	1	1	1	
48	Kec. Pulauaut Selatan	2	2	4	4	
49	Kec. Pulauaut Tengah	2	2	4	4	
50	Kec. Pulauaut Kepulauan	5	5	5	5	
51	Kec. Pulauaut Sigam	8	9	9	9	
JUMLAH		1170	1138	790	782	



2. Data Perlengkapan dan Aset

a. Jenis dan Jumlah Perlengkapan dan Aset

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	0	1	0	-
2	Tanah Bangunan Kantor	1	1	0	0	-
3	Kipas Angin	5	0	0	5	2001
4	Kursi Kerja Biasa	36	12	19	5	2001
5	Lemari Arsip	4	0	4	0	2001
6	Lemari Kayu	19	7	6	6	2001
7	Lemari Rak Kayu	3	3	0	0	2001
8	Meja Kerja	30	3	23	4	2001
9	Mesin Ketik	1	0	1	0	2001
10	Mobil / Mini Bus	1	0	1	0	2001
11	Mobil Mini Bus	1	0	1	0	2001
12	Printer	2	0	0	2	2001
13	Telephon	2	2	0	0	2001
14	AC	4	4	0	0	2002
15	Brankas	1	0	0	1	2002
16	Kursi Tamu	1	1	0	0	2002
17	Mesin Fotocopy	1	0	0	1	2002
18	Sepeda Motor	1	0	0	1	2002
19	Handy Cam	1	0	0	1	2003
20	Sepeda Motor	1	0	0	1	2003
21	Stabilitator	2	2	0	0	2004
22	Antena Parabola	1	0	0	1	2005
23	Komputer	3	0	3	0	2005
24	Komputer PC	3	0	3	0	2005
25	Kursi Kerja Biasa	10	10	0	0	2005
26	Kursi Lipat	10	10	0	0	2005
27	Kursi Tamu	1	1	0	0	2005
28	Lemari Arsip	3	3	0	0	2005
29	Lemari Rak Arsip	3	3	0	0	2005
30	Lemari Rak Kayu	2	2	0	0	2005



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
31	Lemari TV	1	1	0	0	2005
32	Pendingin Ruangan AC	1	1	0	0	2005
33	Printer	3	0	0	3	2005
34	Sepeda Motor	2	2	0	0	2005
35	TV	1	1	0	0	2005
36	Wireles	1	1	0	0	2005
37	Antena Parabola	1	0	0	1	2006
38	Buku Kepustakaan	1	1	0	0	2006
39	Jaringan Telephon	1	-	-	-	2006
40	Komputer Lap Top	1	0	0	1	2006
41	Kursi Eselon	12	12	0	0	2006
42	Kursi Rapat	54	54	0	0	2006
43	LCD Proyektor	2	0	0	2	2006
44	Meja Kerja	3	3	0	0	2006
45	Meja Komputer	2	2	0	0	2006
46	Meja Rapat	1	1	0	0	2006
47	Printer	4	0	4	0	2006
48	Sepeda Motor	1	1	0	0	2006
49	TV	1	1	0	0	2006
50	Brankas	1	0	0	1	2007
51	Buku Peraturan Perundang2an	1	1	0	0	2007
52	Cangkir	1	1	0	0	2007
53	Garpu	1	1	0	0	2007
54	Gorden	1	1	0	0	2007
55	Jam Dinding	1	0	0	1	2007
56	Kalkulator	10	0	0	10	2007
57	Kelengkapan Komputer	1	0	0	1	2007
58	Kipas Baling-baling	10	10	0	0	2007
59	Kompas Gas	1	1	0	0	2007
60	Komputer / Mainframe	1	1	0	0	2007
61	Komputer Lap Top	1	0	0	1	2007
62	Kulkas	1	1	0	0	2007
63	Kursi Makan	30	30	0	0	2007
64	Lemari Berkas	1	1	0	0	2007



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
65	Lemari Makan	1	1	0	0	2007
66	Meja Makan	10	10	0	0	2007
67	Mesin Ketik	2	2	0	0	2007
68	Mesin Kompresor Air	1	1	0	0	2007
69	Monitor Display	5	5	0	0	2007
70	Peralatan Jaringan Komp	1	0	0	1	2007
71	Personal Computer	2	1	0	1	2007
72	Piring	1	1	0	0	2007
73	Sendok	1	1	0	0	2007
74	Software	1	0	0	1	2007
75	Soun Sistem	1	1	0	0	2007
76	Tabung Gas	1	1	0	0	2007
77	Air Conditioner/ AC	2	2	0	0	2008
78	Kelengkapan Komputer	1	0	0	1	2008
79	LCD Proyektor	1	1	0	0	2008
80	Lemari Kayu	1	0	1	0	2008
81	Mesin Ginset/Generator	1	0	0	1	2008
82	Flas Disk	10	4	0	6	2009
83	Note Book/ Lap Top	3	0	0	3	2009
84	Peralatan Jaringan Komp	1	0	0	1	2009
85	Printer	2	0	0	2	2009
86	Air Conditioner/ AC	1	1	0	0	2010
87	Bunga Plastik	1	1	0	0	2010
88	Gelas	1	1	0	0	2010
89	Gorden	1	1	0	0	2010
90	Jam Dinding	1	1	0	0	2010
91	Kamera Digital	1	1	0	0	2010
92	Kipas Angin	1	1	0	0	2010
93	Lemari Kayu	2	2	0	0	2010
94	Mobil Kijang Inova	1	1	0	0	2010
95	Note Book/ Lap Top	3	3	0	0	2010
96	Personal Computer	2	2	0	0	2010
97	Printer	3	3	0	0	2010
98	Sepeda Motor	2	2	0	0	2010



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
99	Bunga Plastik	1	1	0	0	2011
100	Gelas	1	1	0	0	2011
101	Komputer / Mainframe	1	1	0	0	2011
102	Lemari Kaca	1	1	0	0	2011
103	Meja Kerja	4	4	0	0	2011
104	Printer	3	3	0	0	2011
105	Soun Sistem	1	1	0	0	2011
106	UPS	2	2	0	0	2011
1	AC Split	1	1	0	0	2012
2	Gelas Tamu	2	2	0	0	2012
3	Gorden	1	1	0	0	2012
4	Jaringan SAPK	1	1	0	0	2012
5	Karpet	1	1	0	0	2012
6	Lap Top	5	5	0	0	2012
7	Lemari Kayu	3	3	0	0	2012
8	Mouse + Keyboard	1	1	0	0	2012
9	Pagar Parkir	1	1	0	0	2012
10	Printer	3	3	0	0	2012
11	Rak Buku	3	3	0	0	2012
12	Rak Helm	2	2	0	0	2012
13	Rak Sound System	1	1	0	0	2012
14	Rak TV	1	1	0	0	2012
15	Struktur BKD	1	1	0	0	2012
16	Televisi LCD	1	1	0	0	2012
17	Tempat Kue	1	1	0	0	2012
18	Teralis	4	4	0	0	2012
19	UPS	1	1	0	0	2012
20	AC	1	1	0	0	2013
21	Anjungan BKD	1	1	0	0	2013
22	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2013
23	Dispenser	2	2	0	0	2013
24	DUK	1	1	0	0	2013
25	Gorden Vertical	1	1	0	0	2013
26	Komputer Lap Top	6	6	0	0	2013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
27	Komputer PC	4	4	0	0	2013
28	Kulkas	1	1	0	0	2013
29	Kursi Kerja Biasa	5	5	0	0	2013
30	Kursi Komputer	4	4	0	0	2013
31	Kursi Tamu	1	1	0	0	2013
32	Lemari Aluminium	1	1	0	0	2013
33	Meja Kerja	5	5	0	0	2013
34	Meja Komputer	4	4	0	0	2013
35	Mesin Ketik	1	1	0	0	2013
36	Printer Dot Matrik	1	1	0	0	2013
37	Printer Injek	5	5	0	0	2013
38	Struktur BKD	1	1	0	0	2013
39	UPS	4	4	0	0	2013
40	Vacum Clenner	1	1	0	0	2013
41	AC Split	2	2	0	0	2014
42	Kursi Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
43	Gorden	1	1	0	0	2014
44	Meja Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
45	Lemari Arsip	1	1	0	0	2014
46	Kursi Kerja Biasa	60	60	0	0	2014
47	Meja Komputer	60	60	0	0	2014
48	Printer	2	2	0	0	2014
49	Printer Monocrome	1	1	0	0	2014
50	Lemari Mushola	1	1	0	0	2014
51	Lemari Loker	1	1	0	0	2014
52	Kursi Lipat	14	14	0	0	2014
53	Kursi Stanles	2	2	0	0	2014
54	LCD TV	1	1	0	0	2014
55	Alat Pendingin AC	7	7	0	0	2014
56	Komputer PC	60	60	0	0	2014
57	TV LCD 42 Inci	1	1	0	0	2014
58	Printer	4	4	0	0	2014
59	Printer Monocrome	1	1	0	0	2014
60	Printer Besar	1	1	0	0	2014



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
61	UPS	60	60	0	0	2014
62	Faximilie	1	1	0	0	2014
63	Gelas	1	1	0	0	2014
64	Gelas Tamu	5	5	0	0	2014
65	Tempat Kue	1	1	0	0	2014
66	CCTV	1	1	0	0	2014
67	Genset	1	1	0	0	2014
68	AC Split	2	2	0	0	2014
69	AC Split 2 PK	4	4	0	0	2014
70	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2014
71	Sekat Ruangan Kantor	1	1	0	0	2015
72	Pintu Utama Kantor	1	1	0	0	2015
73	PC All in one	5	5	0	0	2015
74	PC All in one (Besar)	1	1	0	0	2015
75	UPS	3	3	0	0	2015
76	Scanner	1	1	0	0	2015
77	Batterai Lapotop	5	5	0	0	2015
78	Server	1	1	0	0	2015
79	Lemari Arsip Diklat	3	3	0	0	2015
80	Lemari Arsip Kepangkatan	1	1	0	0	2015
81	Lemari Arsip Umpeg	1	1	0	0	2015
82	Gordyn	1	1	0	0	2015
83	Karpet lantai	1	1	0	0	2015
84	Taplak Meja	1	1	0	0	2015
85	Sound System	1	1	0	0	2015
86	Kursi Tamu	2	2	0	0	2015
87	Lemari Sound System	1	1	0	0	2015
88	Lemari Arsip Pejabat	1	1	0	0	2015
89	Papan Visual	1	1	0	0	2015
90	Papan data Kepegawaian	1	1	0	0	2015
91	Papan Struktur BKD	1	1	0	0	2015
92	Blender	1	1	0	0	2015
93	tangga Aluminium	1	1	0	0	2015
94	Disvenser	2	2	0	0	2015



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
95	TV Plasma	1	1	0	0	2015
96	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2015
97	Genset	1	1	0	0	2015
98	Jaringan LAN	1	1	0	0	2015
99	Mesin Fotocopy dengan kertas double Folio	1	1	0	0	2016
100	Mesin Absensi	1	1	0	0	2016
101	Penghancur Kertas	1	1	0	0	2016
102	Meja Reseptionis	1	1	0	0	2016
103	Kursi Tamu	2	2	0	0	2016
104	Moubiler lainnya/ Tulisan dinding	1	1	0	0	2016
105	Moubiler lainnya/ Rumah Ginset	1	1	0	0	2016
106	Kursi Kerja	6	6	0	0	2016
107	Dinding/ Sekat Plastik	1	1	0	0	2016
108	Karpet	1	1	0	0	2016
109	AC Split1/2 PK	1	1	0	0	2016
110	AC Split 1 PK	1	1	0	0	2016
111	Kipas Angin	1	1	0	0	2016
112	Alat Dapur lain	1	1	0	0	2016
113	Televisi LCD	1	1	0	0	2016
114	Panel	1	1	0	0	2016
115	Sarung Komputer	1	1	0	0	2016
116	Teralis Besi	1	1	0	0	2016
117	P.C Unit Komputer PC	1	1	0	0	2016
118	Printer	5	5	0	0	2016
119	UPS	2	2	0	0	2016
120	Rounter	1	1	0	0	2016
121	HUB	1	1	0	0	2016
122	RJ-45	2	2	0	0	2016
123	Plug-Book	2	2	0	0	2016
124	Crimping Tool	1	1	0	0	2016
125	Tester	1	1	0	0	2016
126	Klem Kabel	20	20	0	0	2016
127	Radio Acces Point	4	4	0	0	2016
128	Wireles LAN	1	1	0	0	2016



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
129	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	2016
130	Meja Kerja	6	6	0	0	2016
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	8	0	0	2016
132	Ensyclopedia,Kamus, Buku Referensi	7	7	0	0	2016
133	Buku Agama Islam	3	3	0	0	2016
134	Buku Ekonomi	3	3	0	0	2016
135	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2	2	0	0	2016
136	Mesin Absensi	58	58	0	0	2017
137	Mesin Absensi	44	44	0	0	2018
138	Printer	7	7	0	0	2018
139	UPS	3	3	0	0	2018
140	Mouse	1	1	0	0	2018
141	Lap Top	3	3	0	0	2018
142	Note Book	1	1	0	0	2018
143	Hard Disk Internal	1	1	0	0	2018
144	Komputer PC	2	2	0	0	2018
145	Monitor Komputer	1	1	0	0	2018
146	Kursi Esselon III	2	2	0	0	2018
147	Lemari Kaca	5	5	0	0	2018
148	Meja Kerja	1	1	0	0	2018
149	Kursi Esselon IV	2	2	0	0	2018
150	Keyboard dan mouse	9	9	0	0	2018
151	UPS	23	23	0	0	2018
152	Kabel Power dan Adaptor	6	6	0	0	2018
153	Alat Pemadam	2	2	0	0	2018
154	AC	2	2	0	0	2018
155	Buku Manajemen Kinerja	1	1	0	0	2019
156	Buku Undang Undang ASN Aparatur	1	1	0	0	2019
157	Buku Pengadaan Barang / Jasa	1	1	0	0	2019
158	Buku Belajar Singkat PHP 7	1	1	0	0	2019
159	Buku Komputer Grafik / Design	1	1	0	0	2019
160	Buku Sakti Kuasai Exsel	1	1	0	0	2019
161	Buku Iktisar Bahasa Tubuh	1	1	0	0	2019
162	Mesin Absen dan Perlengkapannya	0	0	0	0	2019



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
163	LAN (Lokal Area Network)	2	2	0	0	2019
164	Personal Komputer Lain-Lain (RJ45Ubility)	1	1	0	0	2019
165	Adapter PC	4	4	0	0	2019
166	Kabel Power Adapter PC	6	6	0	0	2019
167	Keyboard	2	2	0	0	2019
168	UPS	6	6	0	0	2019
169	Mouse	5	5	0	0	2019
170	Server	1	1	0	0	2019
171	Router	1	1	0	0	2019
172	Mesin Absen	8	8	0	0	2020
173	Batteray Mesin Absen	10	10	0	0	2020
174	Adaptor Mesin Absen	10	10	0	0	2020
175	UPS	1	1	0	0	2020
176	Kabel LAN	1	1	0	0	2021
177	RJ-45 Cat6	1	1	0	0	2021
178	RJ-45 Cat5e	2	2	0	0	2021
179	Switch/HUB	2	2	0	0	2021
180	Hard Disk Server	1	1	0	0	2021
181	Layar Monitor	1	1	0	0	2021
182	Ram Server	2	2	0	0	2021
183	Eksternal Portabel Harddisk	1	1	0	0	2021
184	Wireless Access Point	5	5	0	0	2021
185	AC Split 1 PK	4	4	0	0	2021
186	AC Split 2 PK	1	1	0	0	2021
187	Kipas Angin	3	3	0	0	2021
188	Proyektor Viewer	1	1	0	0	2021
189	Mikropon	3	3	0	0	2021
190	Kamera Digital	1	1	0	0	2021
191	Printer	1	1	0	0	2021
192	UPS	10	10	0	0	2021
193	Laptop Server	1	1	0	0	2021
194	Scanner	2	2	0	0	2021
195	Handphone	1	1	0	0	2021
196	Laptop	2	2	0	0	2021



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
197	Printer Desks Jet	1	1	0	0	2021
198	scanner	1	1	0	0	2021
199	Lampu Dekoratif	1	1	0	0	2021
Total		827	827	0	0	



3. Data- data Terkait Hasil Pekerjaan

a. Kegiatan yang dilaksanakan

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bagian / Bidang	Keterangan
1	Diklat Prajabatan	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
2	Diklat Kepemimpinan	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
3	Diklat Teknis dan Kepemimpinan	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
4	Pengiriman PNS Tugas Belajar Utusan Pemkab Kotabaru	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
5	Pemberian Ijin Belajar	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
6	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
7	Rapat Tim MPPHD	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
8	Rapat Tim Evaluasi Kinerja PNS	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
9	Training Bintel	Sekretariat	
10	Penyelenggaraan Konseling Pegawai	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
11	Out Bound	Sekretariat	
12	Pemeriksaan Kesehatan Bagi PNS	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
13	Verifikasi Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
14	Verifikasi Satya Lencana Karya Satya	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
15	Sumpah / Janji PNS	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
16	Asistensi Sistem Kinerja Pegawai	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
17	Pelantikan Pejabat Struktural	Mutasi dan Promosi	
18	Rapat Tim Baperjakat dan Sekretariat Baperjakat	Mutasi dan Promosi	
19	Assessment PNS	Mutasi dan Promosi	
20	Pengelola Fasilitasi PNS Pindah Tugas	Mutasi dan Promosi	
21	Seleksi Penerimaan CPNS	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
22	Penempatan PNS	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
23	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
24	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	Pengadaan Dan Pengembangan Aparatur	
25	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai ASN	Mutasi dan Promosi	
26	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Mutasi dan Promosi	
27	Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Mutasi dan Promosi	
28	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Disiplin Kesejahteraan dan Informasi	
29	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat ASN	Mutasi dan Promosi	
30	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Pintu	Sekretariat	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

b. Daftar Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
1	Tata Cara , Persyaratan Pemberian Ijin Belajar,dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	55 Tahun 2012	01 Mei 2012	Pengembangan Pegawai
2	Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Periode 2012-2015	42 Tahun 2012	03 Februari 2012	Pengembangan Pegawai
3	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	59 Tahun 2012	15 Juni 2012	Pengembangan Pegawai
4	Pemberian Tunjangan kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	17 Juni 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
5	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/770/KUM/2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
6	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
7	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional	21 Tahun 2014	19 Maret 2014	Kepangkatan dan Pensiun
8	Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru No 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembeian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	14 Tahun 2015	30 Januari 2015	Pengembangan Pegawai
9	Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	30 Tahun 2015	06 Juli 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
10	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45.796.KUM Tahun 2015	31 Desember 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
11	Perubahan atas Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS	188.45.187.KUM Tahun 2016	07 Januari 2016	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
12	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	28 Tahun 2016	24 Oktober 2016	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
13	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan kabupaten Kotabaru	68 Tahun 2016	27 oktober 2016	Pengembangan Pegawai
14	Tata Cara Perolehan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kotabaru	69 Tahun 2016	07 Nopember 2016	Kepangkatan dan Pensiun
15	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/796/KUM/2015 tentang Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/011/KUM/2017	16 Januari 2017	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
16	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	8 Tahun 2017	Januari 2017	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
17	Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	27 Tahun 2017	6 Oktober 2017	Kepangkatan dan Pensiun
18	Keputusan Bupati kotabaru Tentang Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas	188.45/062/KUM/2018	30 Januari 2018	Pengembangan Kompetensi Aparatur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
19	Keputusan Bupati kotabaru Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Angkatan Pertama Utusan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018	188.45/344/KUM/2018	5 Maret 2018	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
20	Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	17 Tahun 2019	25 Pebruari 2019	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
21	Keputusan Bupati Kotabaru Tentang Pembentukan tim penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Kotabaru	188.45/376/KUM/2019	30 April 2019	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
22	Peraturan Bupati Kotabaru tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	107 Tahun 2020	09 Juli 2020	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
23	Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	137 Tahun 2020	23 September 2020	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah masih belum Optimalnya Kinerja ASN dan Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Didapat dari Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Manajemen Perangkat Daerah yaitu Belum tercapainya kinerja pembangunan disebabkan Aspek ketersediaan SDM Aparatur.

Faktor penyebab masalah yaitu:

1. Kurangnya jumlah aparatur/PNS pada satuan kerja perangkat daerah
2. Kompetensi PNS yang belum memadai
3. Penempatan ASN tidak sesuai Kompetensi
4. Penetapan Layanan Kepegawaian secara elektronik (TTE)

Upaya yang sudah dilakukan yaitu:

1. Pengadaan ASN baru
2. Peningkatan Kompetensi ASN melalui kegiatan Diklat, Bimtek, Pemagangan dan Lomba
3. Uji Kompetensi pelaksanaan ASN
4. Penerapan Layanan E-Signature/TTE

Pada Program Nasional pada agenda Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi;

diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selaras dengan program nasional yaitu Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:

- Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
- Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.



TABEL 2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

No.	Isu Strategis		Permasalahan / Hambatan	Dampak	Tantangan dan Peluang		Tindak Lanjut
1	Masih belum optimalnya kinerja ASN dan belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	1	Kurangnya jumlah aparatur/PNS pada satuan kerja perangkat daerah	Berkurangnya efektifitas kinerja pegawai terhadap tanggung jawab pekerjaannya	Tantangan : Adanya moratorium dari Pemerintah Pusat ditambah dengan jumlah pensiun tahunan pegawai Peluang : Pendistribusian pegawai secara merata melalui jalur mutasi	1	Pengadaan ASN baru
		2	Kompetensi PNS yang belum memadai	Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang	Tantangan : Mengikutsertakan PNS pada Diklat Teknis/ Fungsional/Bimtek/ Lokakarya, Workshop dan Seminar Peluang : PNS dituntut untuk memenuhi standar kompetensi sesuai di bidang tugas	2	Peningkatan Kompetensi ASN melalui kegiatan Diklat, Bimtek, Pemagangan dan Lomba
		3	Penempatan ASN tidak sesuai Kompetensi	Belum optimalnya pelaksanaan tugas PNS	Tantangan : Adanya peningkatan daya saing bagi PNS dalam pengembangan karier Peluang : Menugaskan PNS untuk ikut Uji Kompetensi (UKOM)	3	Uji Kompetensi pelaksanaan ASN
		4	Belum terintegrasi Sistem Informasi Kepegawaian ke seluruh pengelola kepegawaian SKPD Kabupaten Kotabaru	Tidak tepat waktu dalam proses penyelesaian pelayanan kepegawaian	Terjalannya komitmen bersama dari pihak Internal maupun eksternal	4	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan guna pelayanan tepat waktu dan koordinasi aktif ke semua pemangku kebijakan untuk terciptanya pelayanan kepegawaian maksimal

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel 2.4



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kotabaru

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5	6
	BELANJA		BELANJA			47.133.956.815	BELANJA		47.133.956.815
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					32.746.496.815			32.410.841.334
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	10	Dokumen	55.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen 47.809.725
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen 4.513.247
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	1	Dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen 8.428.855
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen 4.391.020
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1	Dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen 8.158.911
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	32	Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	Laporan 74.279.636



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5		6	7	5	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	7	Laporan	65.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu				Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	60	Orang/Bulan	13.101.696.815	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/Bulan
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	12	Dokumen	15.546.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12	Dokumen	700.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen	10.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	16	Laporan	45.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	16	Laporan
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu				Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu		
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100	Paket	200.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket
15	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemulangan Pegawai Pensiun terfasilitasi	7	Orang	100.000.000	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	7	Orang
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan	300	Orang	80.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6	Paket	22.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	15.555.965
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	Paket	120.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	56.702.265
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14000	Paket	350.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13813	Paket	555.268.000
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	65.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	54.369.744
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	8.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	7.200.000
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	12	Laporan	36.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	35.998.017
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	110	Laporan	487.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1185	Laporan	485.623.000
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	1	Dokumen	25.500.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	25.149.611
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu			
25	Pengadaan Mebel	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan	5	Unit	60.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	Unit	111.344.640
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	30	Unit	530.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	418.074.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5		6	7	5	
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9	Unit	60.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12	Laporan	33.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	Laporan
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	89	Laporan	146.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	124	Laporan	395.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	150.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	160.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	39	Unit	24.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45	Unit
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	28	Unit	68.700.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33	Unit



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5		6	7	5	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.012.460.000			5.789.582.448
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Prosentase ASN sesuai Formasi				Prosentase ASN sesuai Formasi		
35	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen
36	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen
37	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	551.000.000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen
38	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	180	Lembaga	110.000.000	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	Dokumen
39	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6	Dokumen	15.000.000	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5	Lembaga
40	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	436.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen
41	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian	2	kali	55.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen
	Mutasi dan Promosi ASN		Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi tepat waktu				Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi tepat waktu		
42	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Mutasi ASN	50	Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50	Dokumen
43	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dokumen	250.000.000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650	Dokumen
44	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	200	Dokumen	503.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200	Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
	Pengembangan Kompetensi ASN		Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)				Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)			
45	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30	orang	2.200.000.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20	Orang	2.199.999.042
46	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1000	Orang	80.000.000	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1000	SK	119.781.000
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik				Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik			
47	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9	Dokumen	422.430.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9	Dokumen	803.412.612
48	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	247	Orang	70.000.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	63	Orang	52.591.290
49	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN	1100	Orang	77.000.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1100	Orang	76.253.140
50	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	Laporan	74.019.762
51	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1	Dokumen	6.930.000	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	0	Dokumen	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					9.375.000.000				8.933.533.033
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN				Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN			
52	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	55	Orang	198.500.000	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80	Orang	198.500.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	5		6
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan				Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional			
53	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	1	Dokumen	808.000.000	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	1	Dokumen	807.993.836
54	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Kotabaru	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	6	Laporan	8.368.500.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7	Laporan	7.927.039.197

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2024 tidak ada.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kotabaru

Perangkat Daerah : BKPSDM Kabupaten Kotabaru

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional dikaitkan RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Pemerintah. Prioritas nasional berdasarkan ringkasan eksekutif RPJMN 2020 – 2024 antara lain:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management.

Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha).

Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksi antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Isu strategis dari tata kelola pemerintahan yaitu:

- 1) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Data KASN (2018) menunjukkan bahwa dari 74 instansi pemerintah diketahui bahwa hanya terdapat enam kementerian yang telah memiliki sistem merit “Sangat Baik”. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.
- 2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan, data KemenPANRB (2018) menunjukkan bahwa 47 K/L, 10 provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan

untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan.

- 3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Data Ombudsman RI (2018) menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian dari 27,27 persen menjadi 55,56 persen; Lembaga dari 20 persen menjadi 25 persen; provinsi 9,09 persen menjadi 62,5 persen; dan kab/kota dari 5,26 persen menjadi 31,6 persen). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.
- 4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan kuangan dari tahun 2015 s/d 2017 (Kementerian/Lembaga dari 65 persen menjadi 55,56 persen; Provinsi dari 85 persen menjadi 97 persen; Kabupaten dari 54 persen menjadi 72 persen; dan Kota dari 65 persen menjadi 86 persen). Selain itu, data KemenPANRB RB (2018) menunjukan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya “Baik” ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian/Lembaga dari 76,62 persen menjadi 92,77 persen; Provinsi dari 50 persen menjadi 94,12 persen; dan Kabupaten/kota dari 8,60 persen menjadi 46,85 persen). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

- 5) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi dari pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui :
 - (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;
 - (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan
 - (c) Penyusunan pola karir instansional.
- 2) Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan proses bisnis instansi;
 - (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; dan
 - (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
 - (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan;
 - (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Instansional.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
 - (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu;
 - (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
 - (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu;
 - (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;
 - (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
 - (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.

Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 pada Misi ke Empat yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik*, dengan tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu dari sasaran dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yang telah disusun antara lain :

- 1) Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel
- 2) Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
- 3) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik

Untuk mewujudkan capaian dari misi keempat RPJMD, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah

Kebijakan daerah tentu mengarah kepada kebijakan nasional dan dalam hal ini Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya tidak lepas dari kebijakan daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Kotabaru dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai acuan mengarah kepada Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang mana Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 :

1. Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Penunjang Sektor Perekonomian
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan
4. Meningkatkan Kualitas SDM
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana prioritas pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 ada poin ke 5 yaitu Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu :

Kebijakan :

- a. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru, Analisis lembaga Pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan melakukan penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta membentuk lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh , hidup dan berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan berpijak pada prinsip sedikit struktur kaya fungsi.
- b. Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas dan tegas.
- c. Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas, tegas dan fleksibel.
- d. Rekrutmen, penempatan, promosi, dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis atau hasil analisis jabatan.
- e. Penataan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan prinsip *"the right man of right job"*.
- f. Peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- g. Penetapan kualifikasi Aparatur (bertakwa, berakhlak, bersih dan kompeten).
- h. Penegakan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- i. Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya dan Pemerataan Penempatan Aparatur Keseluruh Pedesaan dan Kecamatan.



- j. Sistem pembinaan karir aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang prospektif.
- k. Pemberian *reward* dan *punishment* aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.
- l. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mencermati lingkungan internal dan eksternal organisasinya.
- m. Meningkatkan tingkat responsivitas (cepat tanggap dan cepat menanggapi) apa yang menjadi masalah, keluhan dan aspirasi masyarakat serta perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.
- n. Merubah sikap dan perilaku aparatur pemerintah menjadi pelayan masyarakat.
- o. Melakukan *efisiensi penyelenggaraan pemerintahan* baik efisiensi sumber daya manusia, efisiensi sarana maupun efisiensi dana.
- p. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
- q. Peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
- r. Meningkatkan fungsi dan profesionalitas birokrasi daerah sebagai pelayan masyarakat dan pengelola kekayaan daerah.
- s. Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap/satu pintu.
- t. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.



Prioritas dan fokus :

- a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- b. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru
- c. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta berpijak pada prinsip *sedikit struktur kaya fungsi*
- d. Peningkatan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
- e. Peningkatan Pelayanan Prima
- f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan selalu menciptakan sistem dan inovasi baru
- g. Pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian
- h. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan
- i. Peningkatan Pembinaan Sosial Keagamaan
- j. Pemberian Subsidi warga yang meninggal dunia
- k. Pengelolaan Bebas Biaya KTP dan Akte
- l. Optimalisasi pelaksanaan e-KTP
- m. Penerapan Perda SOTK Baru tindak lanjut UU No 23 Tahun 2014
- n. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
- o. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan serta peningkatan peluang pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru
- p. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)

- q. Pembangunan kantor UPTD Dinas Pendapatan
- r. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD
- s. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD.

Dari uraian diatas RKPD Tahun Anggaran 2023 mengarahkan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memprioritaskan dan fokus pada poin d, yaitu : Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada lampiran tabel 3.2.



TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN		SATUAN
						TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kinerja ASN	Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Nilai Rata-rata SKP BAIK	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi	80	85	persen
					Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	30	35	persen
				Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	100	100	persen
2	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Transparan dan Akuntabel	Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan PNS Terhadap Pelayanan Kepegawaian	90	90	persen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program Rutin SKPD terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan SKPD
 - f. Evaluasi Perangkat Daerah
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - 1.2. Administasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
 - b. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Prioritas Pembangunan terdiri dari 2 Program 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan antara lain :

1. Program Kepegawaian Daerah

1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Pengelolaan Data Kepegawaian

1.2 Mutasi dan Promosi ASN

- a. Pengelolaan Mutasi ASN
- b. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

1.3 Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin ASN
- d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum

2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(7)		(7)	
						BELANJA DAERAH				47.133.956.815		48.294.561.815
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				32.411.018.950		32.732.496.815
	5	3				KEPEGAWAIAN				32.411.018.950		32.732.496.815
	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				32.411.018.950		32.732.496.815
	5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				177.884.205		217.000.000
1	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	47.806.850	10 Dokumen	55.000.000
2	5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.512.950	1 Dokumen	5.000.000
3	5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	8.428.500	1 Dokumen	6.000.000
4	5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.390.700	1 Dokumen	5.000.000
5	5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	8.158.600	1 Dokumen	6.000.000
6	5	03	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Laporan	74.279.405	32 Laporan	75.000.000
7	5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30.307.200	7 Laporan	65.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(7)		(7)	
	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29.174.902.343		29.342.796.815
8	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	13.031.692.443	50 Orang/bulan	13.036.696.815
9	5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15.446.390.100	12 Dokumen	15.546.100.000
10	5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	673.139.700	12 Dokumen	700.000.000
11	5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.875.400	2 Laporan	10.000.000
12	5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	14.078.400	16 Laporan	45.000.000
13	5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.726.300	1 Dokumen	5.000.000
	5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				337.694.202		430.000.000
14	5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	156.000.000	4 Paket	250.000.000
15	5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	7 Orang	101.694.500	7 Orang	100.000.000
	5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	-	1 Laporan	-
16	5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	79.999.702	300 Orang	80.000.000
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.235.760.700		1.114.000.000
17	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15.546.000	6 Paket	22.000.000
18	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	56.701.500	12 Paket	120.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(7)		(7)	
19	5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13813 Paket	555.267.000	13813 Paket	350.000.000
20	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	54.369.700	6 Paket	65.000.000
21	5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.110.000	4 Dokumen	8.500.000
22	5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.994.000	12 Laporan	36.000.000
23	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1185 Laporan	485.623.000	1185 Laporan	487.000.000
24	5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.149.500	1 Dokumen	25.500.000
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				674.071.000		650.000.000
25	5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	111.315.000	37 Unit	60.000.000
26	5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	463.051.000	34 Unit	530.000.000
27	5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	99.705.000	8 Unit	60.000.000
	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				409.925.000		575.000.000
28	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	7.530.000	2500 Laporan	33.500.000
29	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	46.640.000	48 Laporan	146.500.000
30	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	355.755.000	96 Laporan	395.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(7)		(7)	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.781.500		403.700.000
31	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	149.841.500	6 Unit	150.000.000
32	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	1 Unit	160.000.000
33	5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45 Unit	27.450.000	45 Unit	25.000.000
34	5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	73.490.000	33 Unit	68.700.000
	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.789.407.812		5.247.065.000
	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.438.191.992		1.327.100.000
35	5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	49.895.000	1 Dokumen	50.000.000
36	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	59.991.000	1 Dokumen	60.000.000
37	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	550.999.647	1 Dokumen	551.000.000
38	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Dokumen	237.898.095	100 Dokumen	110.000.000
39	5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5 Lembaga	-	5 Lembaga	15.000.000
40	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	485.998.400	12 Dokumen	486.100.000
41	5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	53.409.850	2 Dokumen	55.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(7)		(7)	
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				1.025.215.000		803.600.000
42	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	50.297.000	50 Dokumen	50.000.000
43	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	451.578.500	650 Dokumen	250.000.000
44	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	523.339.500	200 Dokumen	503.600.000
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				2.319.779.900		2.280.000.000
45	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	2.199.998.950	20 Orang	2.200.000.000
46	5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1000 Orang	119.780.950	1000 Orang	80.000.000
	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.006.220.920		836.365.000
47	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9 Dokumen	803.412.359	9 Dokumen	604.435.000
48	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	63 Orang	52.536.376	200 Orang	70.000.000
49	5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	-	Orang	-
50	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1100 Orang	76.252.850	1100 Orang	80.000.000
51	5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	74.019.335	10 Laporan	75.000.000
52	5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	-	5 Dokumen	6.930.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(7)		(7)	
	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.933.530.053		10.315.000.000
	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				198.500.000		198.500.000
53	5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	198.500.000	80 Orang	198.500.000
	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				8.735.030.053		10.116.500.000
54	5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	Kab. Kotabaru	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	807.992.053	1 Dokumen	808.000.000
55	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7 Laporan	7.927.038.000	7 Laporan	9.308.500.000

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KOTABARU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						47.133.956.815,00							48.294.561.815,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						47.133.956.815,00							48.294.561.815,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						38.200.426.762,00							37.979.561.815,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	-			100 Persen	32.411.018.950,00						-	32.732.496.815,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	-			100 Persen	177.884.205,00			-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-	-	217.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	47.806.850,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.512.950,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	8.428.500,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.390.700,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	8.158.600,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				32 Laporan	74.279.405,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	30.307.200,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)	-			100 Persen	29.174.902.343,00			-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	29.342.796.815,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	13.031.692.443,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		13.036.696.815,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	15.446.390.100,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		15.546.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	673.139.700,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	6.875.400,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				16 Laporan	14.078.400,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.726.300,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Tepat Waktu	-			100 Persen	337.694.202,00			-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-	-	430.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	156.000.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				7 Orang	101.694.500,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	0,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	79.999.702,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.235.760.700,00			-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	1.114.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	15.546.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	56.701.500,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13813 Paket	555.267.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	54.369.700,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	7.110.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		8.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	35.994.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1185 Laporan	485.623.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		487.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25.149.500,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		25.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	-			100 Persen	674.071.000,00			-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 Unit	111.315.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	463.051.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		530.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	99.705.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	409.925.000,00			-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	575.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2500 Laporan	7.530.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		33.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				48 Laporan	46.640.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		146.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				96 Laporan	355.755.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	-			100 Persen	400.781.500,00			-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-	-	403.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	149.841.500,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	150.000.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				45 Unit	27.450.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	485.998.400,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		486.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				1 Dokumen	53.409.850,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi</i>	-			100 Persen	1.025.215.000,00			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-	-	803.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				1 Dokumen	50.297.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				1 Dokumen	451.578.500,00	- Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningk atkan tata kelola pem erintahan berbasis elektronik	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	523.339.500,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		503.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)	-			1,5 Persen	2.319.779.900,00			-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	2.280.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	2.199.998.950,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		2.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				1000 Orang	119.780.950,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik	-			95 Persen	1.006.220.920,00			-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	836.365.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				9 Dokumen	803.412.359,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		604.435.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				63 Orang	52.536.376,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				0 Orang	0,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1100 Orang	76.252.850,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	74.019.335,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				0 Dokumen	0,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		6.930.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						8.933.530.053,00							10.315.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase Peningkatan Kompetensi ASN	-			75 Persen	8.933.530.053,00						-	10.315.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN	-			1,21 Persen	198.500.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	198.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				80 Orang	198.500.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		198.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional	-			21 Persen	8.735.030.053,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-	-	10.116.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	807.992.053,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		808.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				7 Laporan	7.927.038.000,00	- Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Kotabaru Hilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	-		9.308.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							47.133.956.815,00							48.294.561.815,00	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan digunakan dalam penyusunan visi dan misi Bupati Kotabaru periode 2021-2026.

Kotabaru, 28 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



H. MUHAMAD YUSUF, S.Pd
NIP. 19661109 198503 1 001
PEMBINA TK. I (IV/B)